

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Aubert, V. 1986, *“The Rule Of Law The Promotional Fungsional Law In The Welfaare State”*, dalam G. Teubner, ed. *Dilennas of law in the Walter State* Walter de Gruyter. New York: Berlin.
- Basah, Sjachran. 1985, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Budiardjo, Miriam. 1982, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.
- C. W. Van der Pot. 1932, *Nederlandsh Bestuursrecht*, Alpen aan den Rijn.
- Candra, W. Riawan. 1995, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Revisi*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Djindang, Moh. Saleh. 1990, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar: Jakarta.
- Dr. Gunanegara. 2018, *Mengenal Hukum Agraria dan Real Estate Law*, Jakarta: Tatanusa.
- Edy, Ruchyat. 1999, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*, Alumni, Bandung.
- Harsono, Boedi. 1999, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Edisi Revisi, Cetakan ke-8, Jakarta: Djambatan.
- Homzah, A.A. 2002, *Hukum Pertanahan, Seri Hukum Pertanahan I-Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Seri Hukum Pertanahan II-Sertipikat dan Permasalahannya*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- HR, Ridwan. 2014, *Hukum Administrasi Negara (edisi revisi)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- M. Daud Ali, M. Tahir Azhary, dkk. 1998, *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik*, Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- M. Hadjon, Philipus. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Mashudi. 2001, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press.
- Muchsan. 1981, *Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Parlindungan, A. P. 1994, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.

Sahnan. 2016, *Hukum Agraria Indonesia*, Malang: Setara Press.

Santoso, Urip. 2006, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana, _____ . 2013. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Sarja. 2016, *Negara Hukum Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Thafamedia.

Seno Adji, Oemar. 1980, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga

Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika.

Tahir Azhary, Muhammad. 1992, *Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Cetakan Pertama*, Jakarta, PT.Bulan Bintang.

Putusan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 135/G/2017/PTUN.Bdg.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 130/B/2018/PTUN.Jkt.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari KKN.

PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).

PP Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 61 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2555)

Perpres Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Nasional Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Jurnal

Aloysius R. Entah, 2016. *Indonesia: Indonesia Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila*, Seminar Nasional Hukum Vol. 2 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Angga B. Ch. Eman, 2013. *Penyelesaian Terhadap Penyelesaian Sertipikat Ganda oleh Badan Pertanahan Nasional*, Lex et Societatis, Vol. I/No. 5/September/2013.

Cahya R. Mahendrani, 2019. *Tinjauan Yuridis terhadap Suatu Produk Hukum yang Mengalami Kebatalan Mutlak*.

Runtut Puju Setiadi, 2015. *Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 289 Desa Kedarpan Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1085k/Pdt/2006 Tanggal 25 April 2007)*, Jurnal Idea Hukum Vol. 1 No. 2 Edisi Oktober 2015 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 151.

Utoyo Sutopo, 1992. *Masalah Penyalahgunaan Sertipikat Dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, Yogyakarta: Makalah pada Seminar Nasional Kegunaan Sertipikat dan Permasalahannya.

Internet

<https://www.kompasiana.com/alesmana/552fbe4e6ea83483298b4618/batal-demi-hukum>, dikases tanggal 19 Januari 2019.

<http://widhihandoko.com/?p=148> diakses tanggal 30 Mei 2018

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19216/aspek-dan-implikasi-hukum-dalam-pendaftaran-tanah-dan-penertiban-sertipikat-hakhak-atas-tanah> diakses tanggal 30 Mei 2018.

Martono Wahyunadi, Yodi, *Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam , (on line)*, 2010.

Tersedia: https://www.google.co.id/search?safe=strict&ei=6lWgW9qCDInp9QPgxrWwDA&q=kompetensi+absolut+PTUN&oq=kompetensi+absolut+PTUN&gs_l=psyab.3..0l2j0i22i30k1l4.24828.29375.0.29926.9.9.0.0.0.127.972.3j6.9.0....0...1c.1.64.psyab..0.4.461...33i10k1j35i39k1.0.jq1YM9aUXuU diakses tanggal 18 September 2018.